

SKRIPSI

**POTENSI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN ENREKANG 2012 - 2016**

FEBRIANSYAH

105710193213



**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : **Febriansyah**
Stambuk : **10571 019 32 13**
Program Studi : **ilmu Ekonomi Studi Pembangunan**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Dengan Judul : **Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang
2012 - 2016**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia Penguji Skripsi Strata I (S1) pada hari Rabu, 06 Juni 2018 pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,

2018

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Naidah, SE., M.Si

Muh. Nur Rasvid, SE., MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan IESP

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM : 710 551

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Febriansyah NIM 1057 1019 32 13 Ini Telah Diperiksa Dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar No.0006 /2018Tahun 1439 H/2018 Dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Rabu, 06 Juni 2018 M/21 Ramadhan 1439 H Sebagai persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar ,21 Syawwal 1439 H
06 Juni 2018

Panitia Ujian :

1. Pengawas Ujian : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM (.....) (Rektor Unismu Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dek. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 - 1) Dr. Hj. Ruliaty MM. (.....)
 - 2) Hj. Naidah, SE.,M.SI. (.....)
 - 3) Nasrullah SE.MM (.....)
 - 4) Syafaruddin, SE., MM. (.....)

ABSTRAK

POTENSI PERTUMBUHAN PE REKONOMIAN KABUPATEN ENREKANG 2012 – 2016

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan dan sektor potensial dalam perekonomian wilayah Kabupaten Enrekang sebagai bahan kajian dan rekomendasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (*time series*) dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Enrekang dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2016. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis *Shift Share*.

Hasil analisis *Location Quotient* menunjukkan sektor yang merupakan sektor basis adalah sektor pertanian, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa. Hasil analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa sektor yang berkembang pesat adalah sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan dan sektor yang kompetitif adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa.

Kata kunci : Laju pertumbuhan ekonomi, Pembangunan ekonomi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *Location Quotient*, *Shift Share*, Sektor Unggulan, Sektor Potensial.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT, Rabb alam semesta atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Enrekang 2012-2016”** dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kaum kerabatnya, dan ummatnya hingga hari kemudian.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menyelesaikan penulisan skripsi ini bukanlah perkara yang mudah, banyak tantangan yang harus di lalui, keterbatasan ilmu, biaya serta alat penunjang lainnya makin menambah kesulitan dalam penulisannya, namun berkat dukungan yang tak henti-hentinya dari kedua orang tua serta teman-teman dekat dan berbagai pihak membuat penulis tidak patah semangat dalam menghadapi badai dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, olehnya itu ucapan terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Yang pertama ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda JODDING dan Ibunda DARMA yang bagiku laksana malaikat yang meski sudahn mulai menua tetapi tak pernah kenal lelah dalam mencari biaya untuk melihat anaknya memakai toga. Sekalipun 100 kertas bahkan 1000 lembar kertas yang kutulisi kata-kata tidak akan pernah cukup membalas kebaikan dan pengorbanan serta kasi sayang yang selama ini kalian berikan kepadaku namun. Hanya memberi bakti dan menjadi kebanggaan yang mungkin bisa membalas itu semua namun dengan segala jerip payah akan ku kuras untuk member bakti dan kebanggaan kepada kalian orang tuakau tercinta.
2. Kedua kepada perempuan yang selama ini bersedia mendampingi dan tak hentinya memberi semangat sehingga semangat itu masih tetap terjaga, tpi aku minta maaf kau perempuan yang kumaksud (UK) masih kalah dari orang yang melahirkanku.
3. Terimakasih kepada semua adek-adek, kerabat/letting, serta kakanda-kakanda sekalian di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (HMJ-IESP), dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) berkat ilmu dari kalian semua dan dorongan moril serta moral yang tiada henti kalian berikan juga adalah salah satu alasan penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Naidah, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi yang selama ini tidak pernah bosan member arahan dan bimbingan.

5. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis yang tiada henti member saran demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Lilly Ibrahim, SE, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muh. Nur Rasyid SE, MM selaku pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada penulis selama perkuliahan
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membantu penulis dalam hal administrasi, terima atas bantuannya selama ini.
9. Bapak dan Ibu Pegawai pada Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan penyediaan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Pegawai pada Kantor Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan penyediaan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas tulisan ini.

Makassar 26 Maret 2018

Febriansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori	8
a. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	8
b. Produk Domestik Regional Bruto.....	10

c. Teori Pembangunan Ekonomi	13
d. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	14
e. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi	15
f. Teori basis ekonomi	16
g. Teori Perubahan Struktur Ekonomi	17
h. Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan	19
i. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah	20
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis dan Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Metode Analisis	30
E. Defenisi Operasional Variabel	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
1. Letak dan Kondisi Geografis	37
2. Keadaan Penduduk	38
B. Potensi Unggulan	39
a. Pertanian	39
b. Peternakan	41

c. Sektor Pariwisata	42
d. Pertambangan	43
e. Perindustrian	45
C. Pertumbuhan PDRB	46
D. Struktur Pertumbuhan Ekonomi	47
E. Sektor basis dan non basis kabupaten enrekang	48
a. Sektor Pertanian	49
b. Sektor pertambangan	51
c. Sektor Industri Pengolahan	52
d. Sektor Gas, Listrik dan Air Bersih	53
e. Sektor Bangunan	53
f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	55
g. Sektor Angkutan dan Komunikasi	55
h. Sektor Keuangan dan Persewaan	56
i. Sektor Jasa – Jasa	57
F. Perubahan dan Pergeseran Struktur Perekonomian Kabupaten Enrekang	61
a. Analisis Shift Share	62
b. Analisis Shift Share Pergeseran Bersih	67
G. Ringkasan Hasil Analisi dan Relevansi Kebijakan Yang Tepat di Kabupaten Enrekang	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72

DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

1 . 1	Pertumbuhan PDRB Kab.Enrekang	3
1 . 2	Peranan Setiap Sektor Dalam Perekonomian Kab.Enrekang.....	4
2 . 1	Jurnal Penelitian Terdahulu.....	22
3 . 1	Posisi Relatif Suatu Sektor Berdasarkan Pendekatan PS dan DS	35
4 . 1	Pertumbuhan PDRB Kab.Enrekang	46
4 . 2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	47
4 . 3	Indeks Location Quotient Kab.Enrekang Per Sektor Ekonomi	49
4 . 4	Perubahan Sektoral dan Komponen Yang Mempengaruhi Perekonomian Kab.Enrekang.....	63
4 . 5	Analisis Shift Share Pergeseran Bersih.....	68

DAFTAR GAMBAR

2 . 1	Kerangka Pikir	28
4 . 1	LQ Pertanian	50
4 . 2	LQ Sektor Pertambangan	51
4 . 3	LQ Sektor Industri Pengolahan.....	52
4 . 4	LQ Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.....	53
4 . 5	LQ Sektor Bangunan.....	54
4 . 6	LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	55
4 . 7	LQ Sektor Angkutan dan Komunikasi.....	56
4 . 8	LQ Sektor keuangan dan Persewaan.....	56
4 . 9	LQ Sektor Jasa – Jasa.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 – 2016 Berdasarkan Harga Konstan 2000 (juta rupiah)
2. Data PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Harga Konstan 2010 (juta)
3. Indeks Location Quotient per Sektor Ekonomi Kabupaten Enrekang 2012-2016
4. Perubahan PDRB Kab.Enrekang 2012 – 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang 2008-2013, Pemerintah Kabupaten Enrekang memperoleh sekitar 83 persen (\pm Rp. 500 Milyar) terhadap total pendapatan melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum pada tahun 2007. Dan merupakan daerah penerima DAU terbesar dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Disamping itu memperoleh PAD sekitar 6 persen (\pm Rp.40 Milyar) terhadap total pendapatan daerah. Hal ini berarti Kabupaten Enrekang memiliki sumber pendapatan yang lebih potensial dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai pembangunan.

Melalui otonomi daerah pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya.

Tabel 1.1

Pertumbuhan PDRB Kab. Enrekang 2012-2016

Tahun	PDRB Harga Konstan(2000)		PDRB Harga Berlaku	
	Jumlah(Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Jumlah(Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
2012	2,442,711.22	5.79	3,860,830.95	16.02
2013	2,589,298.00	6.00	4,423,743.60	14.58
2014	2,776,659.84	7.24	5,348,744.99	20.91
2015	2,985,922.40	7.54	6,412,549.40	19.89
2016	3,213,085.05	7.61	7,803,369.81	21.69

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

Berdasarkan tabel 1.1, selama lima tahun terakhir secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang menunjukkan gambaran positif. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan berdasarkan harga konstan sebesar 5.97 persen kemudian naik menjadi 6.00 persen di tahun berikutnya. Kemudian laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,24 persen. Kemudian naik di tahun 2015 sebesar 7,54 persen dan 7,61 persen di tahun 2016. Sementara laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2012 sebesar 16,02 persen kemudian turun menjadi di tahun berikutnya 14,58 persen. Dan naik secara signifikan di tahun 2014 sebesar 20,91 persen kemudian terjadi penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 19,89 persen dan kembali naik di tahun 2016 sebesar 21.69 persen.

Tabel 1.2
**Peranan Setiap Sektor Ekonomi Dalam Perekonomian Kabupaten
 Enrekang
 Tahun 2012-2016 (Persentase)**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian	54.90	53.31	52.65	51.94	51.58
Pertambangan dan Penggalian	0.39	0.48	0.54	0.60	0.60
Industri Pengolahan	9.33	9.19	8.87	8.58	8.42
Listrik Gas dan Air Bersih	0.77	0.72	0.73	0.74	0.75
Bangunan	4.60	5.59	6.32	6.98	7.62
Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.79	8.37	8.48	8.41	8.66
Angkutan dan Komunikasi	4.82	5.49	5.55	5.49	5.46
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.53	4.90	5.10	5.41	5.70
Jasa-jasa	11.87	11.95	11.76	11.85	11.20
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Enrekang. Namun kontribusi sektor pertanian selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami penurunan. Yaitu pada tahun 2013 sebesar 54,9 persen dan kemudian perlahan-lahan turun menjadi 51,58 persen di tahun 2016. Selain sektor pertanian, adapun sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik dan Air Bersih, sektor Perdagangan dan Hotel, dan sektor Jasa-jasa yang juga mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Enrekang. Hal itu disebabkan karena terjadinya peningkatan kontribusi di sektor ekonomi lainnya. Sektor yang mengalami peningkatan yang signifikan terjadi pada sektor Bangunan pada tahun 2012 sebesar 4,60 persen menjadi 7,62 persen di tahun 2016. Peningkatan kontribusi juga terjadi pada sektor Pertambangan, sektor Angkutan dan Komunikasi, dan sektor Keuangan.

Dengan seluruh kondisi di atas, maka timbul pertanyaan apa yang menyebabkan pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Enrekang. Apakah karena faktor eksternal yang berupa perubahan perekonomian di tingkat provinsi atau apakah karena daya saing daerah yang dimiliki Kabupaten Enrekang. Kemudian apakah perubahan kontribusi sektoral yang terjadi telah di dasarkan kepada strategi kebijakan pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Karena untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang

memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba menggambarkan pola perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian, serta menentukan sektor-sektor unggulan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan permasalahan di atas muncul beberapa pertanyaan:

1. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Enrekang 2012-2016.?
2. Bagaimana perubahan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Enrekang 2012-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Enrekang periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui perubahan dan pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Enrekang periode 2012-2016.

D. Manfaat Penelitian

Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah :

1. Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang potensi pertumbuhan di Kabupaten Enrekang sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan potensi daerahnya.
2. Dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Enrekang dalam rangka program pembangunan selanjutnya dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada.
3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak manapun yang berminat dalam melakukan penelitian yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut.

Beberapa pakar ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Para pakar ekonomi yang membedakan kedua pengertian tersebut mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto pada suatu tahun tertentu dibagi dengan tingkat pertumbuhan penduduk, atau Perkembangan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu

lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perluasan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2002) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting (Arsyad, 1999) seperti akumulasi modal yang merupakan semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (*human resources*), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan akan meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang telah ada. Kemudian pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara produktif.

Selain faktor-faktor tersebut, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Kuznets (Todaro, 2000) juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yaitu, tingkat pertambahan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja. Kemudian tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi dan tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi juga merupakan ciri proses pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya kecenderungan daerah yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian daerah lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

Perhitungan metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil perhitungan yang sama (BPS, 2008).

Pendekatan produksi (*Production Approach*) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit

produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui nilai tambah (*value added*). Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector atau sub sector tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara.

Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara (Tarigan, 2007).

Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector yang produksinya berbentuk fisik/barang. PDRB menurut pendekatan produksi terbagi atas 9 lapangan usaha (sector) yaitu : pertanian, industri pertambangan, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi, perdagangan, angkutan, lembaga keuangan ; jasa-jasa. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan PDRB pendekatan Produksi (Suryana, 2000)

Pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dilakukan dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan

semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS, 2008)

Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*) dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS,2008)

Kemudian penghitungan PDRB dengan metode tidak langsung atau metode alokasi diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini, digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto dan netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan ; jumlah produksi fisik ; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

Cara penyajian PDRB terdapat PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Dan penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

3. Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000). Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan (Suryana, 2000).

Sadono Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu

masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Todaro (Tarmidi, 1992) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dalam penelitian ini pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang

4. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif,

perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005:19).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

5. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product/Gross National Product tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,1999). Namun demikian pada umumnya para ekonom memberikan

pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di daerah maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang.

6. Teori Basis Ekonomi

Kegiatan perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yaitu aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan berorientasi lokal yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis (Sjafrizal, 2008)

Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik Location Quotient (LQ), untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis. Teknik analisis LQ dapat menggunakan variabel tenaga kerja atau PDRB suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi wilayah. Location Quotient merupakan rasio antar jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama dengan daerah yang lebih tinggi (referensi).

7. Teori Perubahan Struktur Ekonomi

Teori-teori perubahan struktural (*structural change theory*) memusatkan perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur modern serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh W.Arthur Lewis dan Hollis B. Chenery (Todaro, 2000).

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara desa dan kota, mengikutsertakan proses pembangunan yang terjadi antara kedua tempat tersebut. Teori ini membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada (Kuncoro, 1997).

Sementara teori pola pembangunan Chenery memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan

struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri.

Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi atau disebut juga transformasi struktural, didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi) yang disebabkan adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Todaro, 2000).

Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi perubahan struktur perekonomian dimana semula mengandalkan sektor pertanian menuju sector industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi pertanian meningkat. Perubahan ini tentu akan mempengaruhi tingkat pendapatan antar penduduk dan antar sektor ekonomi, karena sektor pertanian lebih mampu menyerap tenaga kerja dibanding sektor industri, akibatnya akan terjadi perpindahan alokasi pendapatan dan tenaga kerja dari sektor yang produktifitasnya tinggi yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya perubahan struktur perekonomian antara lain ketersediaan sumber daya alam,

sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah.

8. Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan/kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah (Sambodo dalam Gufron, 2008).

Menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria daerah lebih ditekankan pada komoditas unggulan yang bisa menjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat, baik sesama komoditas maupun komoditas lainnya. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.

Selain itu, komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).

Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Begitu komoditas yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus menggantikannya.

Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, social, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disintensif dan lain-lain. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

9. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah.

Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan

negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan/ kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak.

Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin akan sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001).

Pembangunan sektor ekonomi dengan mengacu pada sector unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

B. Penelitian Terdahul

Tabel 2.1

Jurnal Peneliti Terdahulu

No	Penulis, Tahun dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1.	Fachrurrazy, 2009, Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB	Persentase sumbangan masing-masing sektor dalam PDRB Kabupaten Aceh Utara dengan persentase sektor yang sama pada PDRB Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Analisis Location Qoutient (LQ), ypology Klassen, Shift Share	1.Sektor yang maju dan tumbuh pesat yaitu sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi 2.Sektor yang merupakan sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, dan

				sektor pengangkutan dan komunikasi 3.Sektor yang merupakan sektor kompetitif yaitu, sektor pertanian,sektor bangunan dan konstruksi, dan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya.
--	--	--	--	--

<p>2. Evi Gravitiani, 2006, Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Yogyakarta.</p>	<p>PDRB Kota Yogyakarta serta PDRB Provinsi DIY</p>	<p>Analisis Shift- Share</p>	<p>Perubahan keunggulan kompetitif Kota Yogyakarta yang menunjukkan nilai positif adalah sector pertambangan dan sector penggalan; sector bangunan; sector perdagangan; hotel dan restoran; sector keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; serta sector jasa-jasa</p>
--	---	----------------------------------	--

3.	<p>Agus Tri Basuki, 2005, Peranan Kabupaten Way Kanan dalam Pembentukan PDRB Provinsi lampung tahun 1999-2002</p>	<p>PDRB, kontribusi lapangan usaha Kabupaten Way Kanan terhadap Provinsi Lampung</p>	<p>Analisis LQ, Analisis Shift-Share</p>	<p>Kontribusi terbesar Kab. Way Kanan terhadap Lampung diberikan oleh sektor pertanian, diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi terendah diberikan oleh sektor listrik, gas dan air bersih.</p>
----	---	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan geografi dan potensi ekonomi wilayah merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ini. Di samping itu, kurang lancarnya arus barang dan faktor produksi antar wilayah turut pula memicu terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah merupakan kebijaksanaan ekonomi daerah yang sangat penting dan strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah.

Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembanguana ekonomi daerah di masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal maupun per sektor.

Perkembangan PDRB atas harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan diupayakan untuk

menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

1. Sektor Basis dan Non Basis

Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis diklasifikasikan ke dalam sektor basis dan non basis. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi

kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor dan non ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke tahun.

2. Perubahan dan Pergeseran Sektor

Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah referensi. Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB memiliki keunggulan kompetitif ataupun sebaliknya

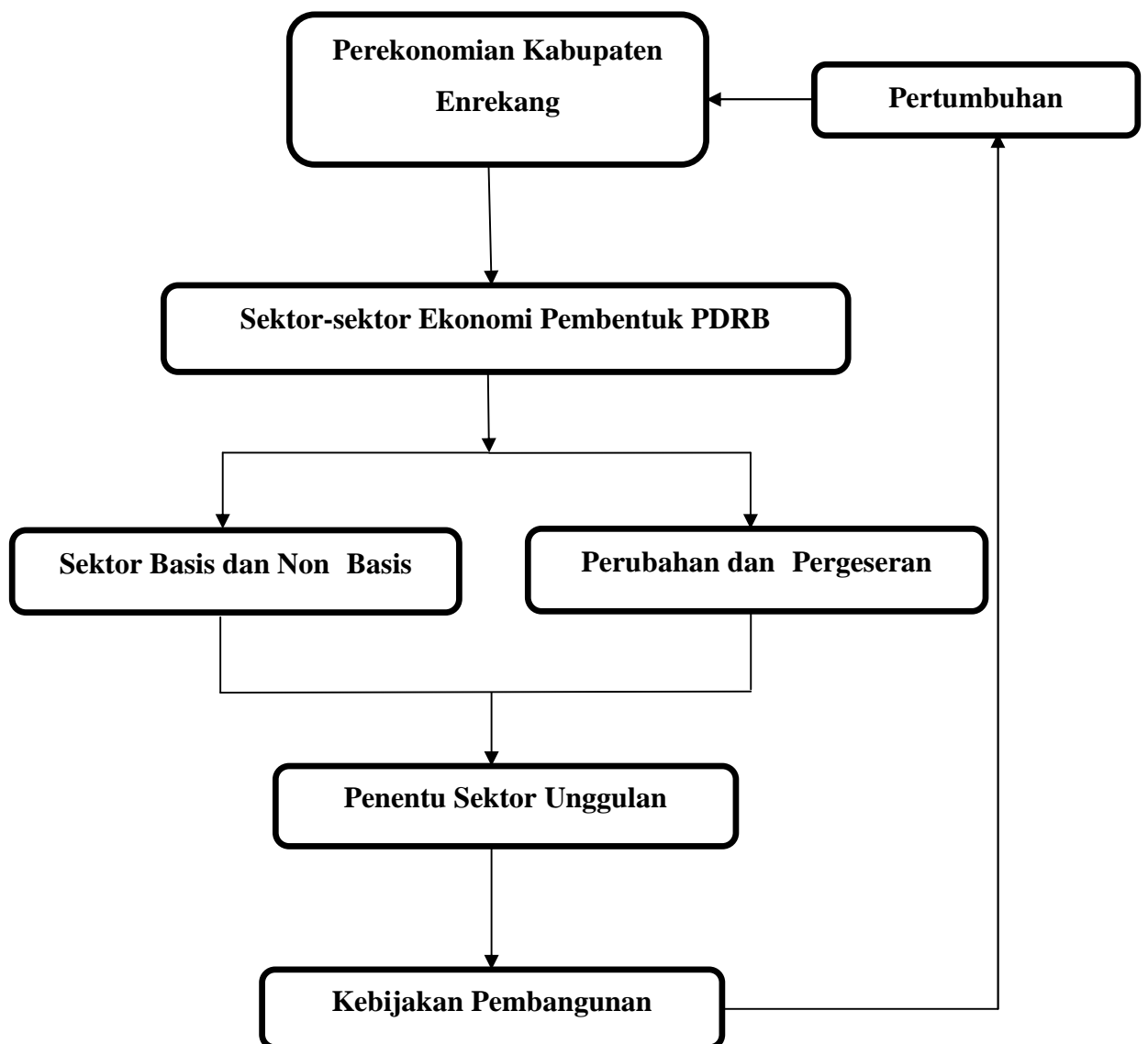
Dengan melakukan analisis tersebut, maka dapat ditentukan sektor apa saja yang berkembang lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lain. Dan sektor-sektor yang perkembangannya lebih cepat daripada sektor itulah yang kemudian akan menjadi sektor unggulan.

Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan

mendorong pengembangan ekspor barang dan jasa. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, yang merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang dijadikan objek penelitian karena dilihat dari letak geografis, luas wilayah dan populasi penduduk, menjadikan wilayah ini memiliki peranan penting dalam perekonomian antar Provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Enrekang dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dan data PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2016. Data ini diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Enrekang, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA Kabupaten Enrekang), berbagai literatur, situs resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang ditubuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu Teknik pengambilan data dan informasi yang relevan dengan cara mengamati secara langsung semua kegiatan perekonomian yang ada di kabupaten Enrekang.
- b. Studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan teori mengenai perkembangan dan rencana pembangunan ekonomi daerah melalui literatur-literatur, laporan-laporan, makalah-makalah, seminar, jurnal, artikel majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.
- c. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan masyarakat dan pemerintah yang terkait dan berwenang dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

D. Metode Analisis

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa metode analisis data, yaitu :

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Enrekang, digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode ini membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat nasional atau di tingkat regional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan merupakan sektor non basis (Kuncoro, 2004).

Dimana :

LQ : Index Location Quotient

S_i : PDRB sektor i di Kabupaten Enrekang

S : PDRB total Kabupaten Enrekang

N_i : PDRB sektor i di Provinsi Sulawesi Selatan

N : PDRB total Sulawesi Selatan

Berdasarkan formulasi yang di tunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang diperoleh yaitu:

1. Nilai $LQ = 1$. ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten Enrekang adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nilai $LQ > 1$. ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten Enrekang lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian Sulawesi Selatan.
3. Nilai $LQ < 1$. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten Enrekang lebih kecil dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Dengan kata lain apabila $LQ > 1$, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Enrekang. Sebaliknya apabila nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Enrekang.

Data yang digunakan dalam analisis LQ ini adalah PDRB Kabupaten Enrekang menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000.

2. Analisis *Shift Share* (S-S)

Untuk mengetahui pergeseran dan perubahan sektor pada perekonomian Kabupaten Enrekang, dapat menggunakan Analisis Shift Share. Hasil analisis Shift Share akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB Kabupaten Enrekang dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Bila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Kabupaten Enrekang memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya

Analisis *Shift Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian suatu daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu :

- (1) Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
- (2) Pergeseran proporsional mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.

(3) Pergeseran diferensial menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan.

Analisis ini memiliki beberapa keunggulan antara lain (Prasetyo Soepone, (1993).

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi walau analisis *Shift-Share* tergolong sederhana.
2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Melalui analisis *shift share*, maka pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Enrekang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:

1. *Provincial Share* (P), digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Enrekang dengan melihat nilai PDRB Kabupaten Enrekang sebagai daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil perhitungan *Provincial Share* akan menggambarkan peranan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Enrekang.
2. *Proporsional Shift* (PS), digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nilai tambah bruto sektor tertentu pada Kabupaten Enrekang dibandingkan total sektor di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

3. *Differential Shift* (DS), digunakan untuk mengetahui perbedaan antara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Komponen PS dan DS memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. PS merupakan akibat pengaruh unsur-unsu eksternal yang bekerja secara nasional (provinsi), sedangkan DS adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan. Sektor-sektor di Kabupaten Enrekang yang memiliki DS positif, memiliki keunggulan terhadap sektor yang sama pada kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, sektor-sektor yang memiliki nilai DS positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Enrekang dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila DS negatif, maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban.

Kemudian dari hasil perhitungan PS dan DS, kita dapat menentukan pergeseran bersih (*net shift*) dengan menjumlahkan komponen PS dan DS. Apabila nilai $PB > 0$, maka pertumbuhan di sektor i di wilayah r termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Apabila $PB < 0$, maka pertumbuhan di sektor tersebut termasuk lamban.

Dari kedua komponen tersebut (PS dan DS) dapat dinyatakan dalam suatu bidang datar, dengan nilai PS sebagai sumbu horizontal dan nilai DS sebagai sumbu vertical, akan diperoleh empat kategori posisi relative dari seluruh daerah atau sektor ekonomi tersebut. Keempat kategori dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1**Posisi relatif suatu sektor berdasarkan pendekatan PS dan DS**

<i>Differential Shift</i> (DS)	<i>Proportional shift</i>	
	<i>Negative (-)</i>	<i>Positif (+)</i>
<i>Positif (+)</i>	Kuadran IV Cenderung berpotensi (<i>highly potential</i>)	Kuadran I Pertumbuhan pesat (<i>fast growing</i>)
<i>Negatif (-)</i>	Kuadran III Terbelakang (<i>depressed</i>)	Kuadran II Berkembang (<i>developing</i>)

Sumber : (Fredy, 2001)

1. Kuadran I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat (*rapid growth region/industry or fast growing*).
2. Kuadran II (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah/sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang tertekan namun berkembang (*developing region/industry*).
3. Kuadran III (PS negatif dan DS negatif) adalah wilayah/sektor dengan peran terhadap wilayah rendah dan juga memiliki daya saing lemah (*depressed region/industry*).
4. Kuadran IV (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah/sektor dengan kecepatan pertumbuhan yang tertekan namun berkembang (*highly potential region/industry*).

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberi batasan definisi operasional sebagai berikut :

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan.
2. Sektor ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, yang mencakup 9 (sembilan) sektor utama yaitu pertanian, pertambangan dan penggalan, industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan dan persewaan jasa perusahaan, dan jasa-jasa.
3. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang berkaitan.
4. Sektor potensial adalah sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam suatu wilayah. Hal ini dapat diukur dengan analisis *shift share* jika komponen daya saingnya positif (DS+) maka sektor tersebut termasuk potensial.
5. Pergeseran sektor ekonomi adalah perubahan kinerja sektor-sektor ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi provinsi, pertumbuhan sektor tertentu, atau disebabkan oleh daya saing lokal.
6. Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki peranan relatif besar dibandingkan sektor-sektor lainnya terhadap ekonomi wilayah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ} 14' 36'' - 3^{\circ} 50' 00''$ LS dan $119^{\circ} 40' 53'' - 120^{\circ} 06' 33''$ BT dan berada pada ketinggian 442 mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². Kabupaten Enrekang berbatasan langsung dengan tana Toraja di sebela utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di sebela selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan di sebela barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Selama setengan dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintah baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 dan 192 desa/kelurahan.

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Enrekang terbagi atas wilayah perbukitan karst (kapur) yang terbentang di bagian utara dan tengah, lembah-lembah yang curam, sungai serta tidak mempunyai wilayah pantai. Jenis flora yang banyak ditemukan jenis pohon *bitti* atau yang biasa disebut *vitex cofassus*, pohon hitam Sulawesi atau *diospiros celebica*, pohon ulin/kayu besi *eusideraxylon zwageri*, pohon *lithocarous celebica*, kayu bayam, kayu agatis, kayu kuning. Selain itu terdapat juga rotan lambang, rotan tohiti

dan rotan taman. Jenis angrek juga banyak ditemukan yaitu angrek Sulawesi, angrek kalejengking, dan jenis jenis lainnya.

2. Keadaan penduduk

Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sekitar 190.579 jiwa.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Enrkenang memiliki kekhasan tersendiri. Hal itu disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar, dan Tanah Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrenpulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang, dan Maiwa. Bahasa duri dituturkan di kecamatan alla', Baraka, Malua, Buntu batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di kecamatan Anggeraja. Bahasa enrekang dituturkan di kecamatan Enrekang, Cendana, dan sebagian penduduk di Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan di kecamatan Maiwa dan Bungin.

Terbentuknya struktur pelapis sosial masyarakat Enrekang berawal dari konsep *To Manurung*, yang tiba-tiba turun dari langit yang dianggap luar biasa dan memberikannya kewibawaan yang ampuh dalam menghadapi rakyat, hal ini pula memberi suatu anggapan pada masyarakat bahwa status sosial *To Manurung* dan keturunannya lebih tinggi dari masyarakat biasa.

B. Potensi Unggulan

A. Pertanian

Besarnya peranan/kontribusi sumber daya alam dalam pengembangan sektor pertanian, tercermin dari luas lahan yang dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian. Luas panen padi sawah pada tahun 2010 sebanyak 8.157 Ha dengan tingkat produksi mencapai 37.762.340 Kg. luas panen pada tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, bahkan pada tahun 2009 luas panen padi mencapai 12.006 Ha penurunan luas panen tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah produksi dari 60.781.920 Kg pada tahun 2009 menjadi 37.762.340 Kg pada tahun 2010. Selama 5 tahun terakhir penurunan luas panen dan jumlah produksi juga terjadi pada komoditas jagung.

Kabupaten Enrekang dikenal mempunyai potensi di sektor pertanian yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Bawang merah

Produksi bawang merah di Kab.Enrekang mencapai 13.432,67 ton per tahun dan wilayah yang paling tinggi produksinya adalah Kec.Anggeraja mencapai 4.949,51 ton per tahun dengan luas lahan tanaman 399 Ha.

2. Cabe besar

Di Kab.Enrekang produksi cabe merah mencapai 5.561,59 ton per tahun dan yang paling tinggi produksinya adalah Kec.Anggeraja yang dapat mencapai 1.498,22 ton per tahun dengan luas lahan tanam 229 Ha

3. Kentang

Komoditi kentang di Kab.Enrkenang mencapai 2.712,40 ton per tahun dan wilayah kecamatan paling tinggi produksinya adalah Kec.Alla dan Kec.Masalle yang dapat mencapai 2.452,09 ton pertahun dengan luas lahan tanam 155 Ha.

4. Tomat

Dari 9 kecamatan wulayah yang paling tinggi produksinya adalah Kec.Baroko dan Kec.Masalle mencapai 2.226,62 ton per tahun.

5. Wortel

Kecamatan yang paling tinggi produksinya adalah Kec.Masalle mencapai 2.226,39 ton per tahun.

6. Bawang Daun

Wilayah yang paling tinggi produksinya adalah Kec.Enrekang dengan produksi mencapai 208,43 ton pertahun dengan luas lahan 87 Ha.

7. Jahe

Wilayah yang paling tinggi produksinya adalah Kec.Enrekang dengan produksi per tahu mencapai 208,43 ton per tahun dengan luas lahan 87 Ha.

8. Kubis

Kec.Baroko yang menjadi wilayah tempat tanam yang satu ini paling banyak di produksi yaitu mencapai angka 7.089,43 ton per tahun dengan luas lahan tanam 37 Ha. Setiap minggunya sekitar 15 ton dikirim ke luar provinsi seperti Kalimantan, Manado dan kendari.

9. Kopi

Penghasil kopi yang paling tinggi di Kab.Enrekang adalah Kec.Baroko dengan jumlah produksinya mencapai 2.041 ton per tahun dengan lahan tanam 3.424 Ha. Sementara lahan hamparan kopi di kawasan timur Kab.Enrekang yaitu Kec.Bungin yang luasnya di perkirakan +1.057 Ha

B. Peternakan

1. Kawasan Utara

Populasi ternak kambing paling tinggi 33,469 ekor dari 42:375 ekor total Kabupaten dan tersebar di 5 wilayah kecamatan, karena itu di kawasan utara ditetapkan sentra agrobisnis kambing yang di perkirakan 8.000-10.000 ekor ternak kambing dalam setahun.

Sentra pengembangan kambing BURAWA asal Australia terdapat di kec.Anggeraja lokasinya pada kampung Belalang.

Teaching Farm merupakan sentra pelatihan peternakan dengan luas lokasi sekitar 100 Ha. Bersertifikat pemda lokasinya di dusun Rantelimbong kec.Curio, Bolang Kec.Malua

2. Kawasan Selatan.

Tepatnya di dusun lekkong Kec.Cendana merupakan pusat pengembangan sapi perah sebagai sumber susu segar untuk pembuatan dangke. Ahir-ahir ini sulitnya mendapatkan bibit utamanya sapi potong dan sapi perah namun dengan *BREECHENG CENTER* di Maiwa sangat tepat untuk mendukung suplay sapi bakalan bibit(bibit sapi penggemukan) di kawasan utara dan sapi bakalan induk pengembangannya di kawasan selatan Kab.Enrekang

C. Sektor Pariwisata

Kalau di Tanah Toraja ada permandian yang sudah terkenal ke Dunia Internasional, di kota Massenrempulu juga terdapat berbagai permandian serta obyek wisata lainnya seperti :

1. Permandian lewaja

Permandian alam lewaja mempunyai jarak 6 km dari Ibu kota Enrekang. Arah timur dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Disamping dapat menikmati kolam tenang lewaja, kita dapat juga menikmati keindahan alam lewaja, dengan air jernih dan sejuk.

2. Villa Bambapuang

Villa tersebut sangat strategis karena lokasinya berada pada jalur menuju daerah wisata Tanah Toraja yaitu 18 km arah utara Kab.Enrekang dan berada di ketinggian 800 mdpl. Di villa ini wisatawan sering mengambil gambar keindahan Gunung Nona.

3. Buntu Kabobong

Buttu kabobong berada di sekitar desa Bambapuang Kec.Anggeraja dengan menempuh jarak 18 km dari kota Entekang dari arah utara menuju Tanah Toraja dan berada di ketinggian sekitar 800 mdpl dan dapat ditempuh 20 menit perjalanan.

4. Gunung Latimojong

Gunung latimojong atau yang biasa orang kenal dengan sebutan gunung Rante Mario yang memiliki ketinggian sekitar 3.460 mdpl cukup menarik bagi wisatawan local maupun mancanegara

5. Dante Pine'

Kawasan wisata ini berkat media sosial yang sudah canggih sekarang sehingga dengan mudah dikenal diluar dan dengan cepat ramai pengunjung dari berbagai daerah. Kawasan wisata ini terletak di Kec.Anggeraja dan dapat ditempuh sekitar 20 menit dari kota Enrekang.

D. Pertambangan

Berdasarkan penelitian dan pemetaan yang pernah dilakukan di Kabupaten Enrekang dapat di ketahui berbagai potensi lahan galian yang tersebar di berbagai kecamatan. Bahan galian tersebut diantaranya adalah minyak bumi, batu bara, emas, perak, logam dasar, marmer, pasir kuarsa, kaolin dan lain lain. Semua sumberdaya tersebut sudah diketahui penyebarannya, namun baru sebagian bahan galian yang teridentifikasi jumlah cadangan di setiap wilayahnya.

1. Minyak Bumi

Merupakan bahan galian yang telah diketahui berdasarkan rembesan

- Rembesan minyak terdapat didaerah Batu Ke'de yaitu 280 km arah barat laut dari permukaan penduduk pada pormologi dengan ketinggian 1.450m dari permukaan laut.
- Rembesan minyak bumi di daerah membuka (desa Camba dan Gareppa)

2. Batu Bara

Dikenal pula dengan bahan galian fosil atau organik karena proses pembentukan berasal dari sisa kehidupan manusia masa lampau yang bertempat

di dua lokasi yakni di lapangan Batu Noni dan Lapangan Banti sebesar 405.000 ton.

3. Emas

Penyebaran emas dan perak dapat dijumpai di daerah aliran Sungai Malua Kecamatan Malua dari desa Pinang Kecamatan Cendana.

4. Pasir Kuarsa

Berdasarkan hasil perhitungan luas dan ketebalan pasir kursor terdapat di daerah Kasambi dengan jumlah cadangan 6.000 dan daerah Pana dengan jumlah cadangan sebesar 2.400.600 m dan kecamatan Baroko kampung Lumbaja sebesar 3.223.750 ton.

5. Marmer

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan cadangan dengan faktor koreksi 40% maka didapatkan cadangan :

- Buntu Batu : 259.937m
- Liang Bai Eran Batu : 34.187.500m
- Asaan : 375.000.000m
- B.Langisan dan sekitarnya : 2.800.000.000m

6. Batu Serpih

Bahan galian ini berwarna kecoklatan hingga ungu, bersifat plastic dan kaku bila kering dan menyerpih. Luas penyebarannya diperkirakan skitar 682.500 dengan ketebalan 5 m bahan galian ini digunakan sebagai cat pewarna,perabot rumah tangga.

7. Batu Setenga Mulia

Penyebarannya dapat dijumpai di kec.maiwa dan dusun malino.kegunaan dari bahan galian ini adalah untuk membuat permata dan batu perhiasan.

E. Perindustrian

Selain pertanian yang menjanjikan di Kabupaten Enrekang sektor perindustrian juga mencuri perhatian para investor asing untuk masuk menanamkan modal karenan potensi yang menjanjikan dan ditopang oleh bahan baku perindustrian yang mudah di dapatkan, dapun beberapa industri yang mempunyai potensi besar sebagai berikut :

1. Benang sutra

- Budi daya tanaman murbei di Kab.Enrekang terdapat di wilayah Kec.Alla, Anggeraja dan Baraka sebagai pakan ulat sutera sekitar 651 Ha.
- Jumlah petani pemelihara ulat sutera sebanyak 1.044 kk dengan produksi kokoh 191.988 Kg.
- Pengrajin pemintal benang sutera sebanyak 735 unit usaha dan menyerap tenaga kerja 1.875 orang dengan produksi rata-rata pertahun 29,5 ton.

2. Gula Merah

- Sebagai penghasil gula merah terbanyak dengan jumlah 1.286 unit usaha, jumlah produksi pertahun 682.775 ton atau rata-rata 57 ton per bulan.
- Harga gula batangan/bulat Rp.12.000 s/d Rp.20.000 per Kg.
- Penyerapan tenaga kerja berjumlah 2.600 orang.

3. Dangke

Merupakan makanan khas masyarakat Enrekang dimana bahan bakunya berasal dari susu sapi.

- Pengrajin dangke di kabupaten Enrekang sebanyak 182 unit usaha dalam dua kecamatan yaitu Kec.Enrekang dan Kec.Curio, produksi yang dapat dihasilkan dalam satu tahun mencapai 96.000 liter susu yang terdiri dari susu sapi dan kerbau.

C. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Enrekang telah menunjukkan peningkatan walaupun perkembangannya belum optimal. Berbagai program yang telah dilaksanakan mampu memberikan hasil yang cukup baik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB (ekonomi) Kabupaten Enrekang. Tabel di bawah ini menunjukkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2012-2016.

Tabel 4.1

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2016

Tahun	PDRB Harga Konstan(2010)		PDRB Harga Berlaku	
	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan(%)	Jumlah (Rp)	Pertumbuhan(%)
2012	2,442,711.22	5.97	3,860,830.95	16.20
2013	2,589,298.00	6	4,423,743.60	14.58
2014	2,776,659.84	7.24	5,348,744.99	20.91
2015	2,985,922.40	7.54	6,412,549.40	19.89
2016	3,213,085.05	7.61	7,803,369.81	21.69
Rata-rata	2,801,535.30	7.61	5,569,847.75	18.61

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

D. Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Jika dilihat dari hasil perhitungan PDRB Kabupaten Enrekang selain dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi, juga dapat diketahui Peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Enrekang. Peranan dari masing-masing lapangan usaha ini menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Enrekang. Semakin besar peranan suatu lapangan usaha maka semakin besar pula pengaruhnya dalam perkembangan perekonomian di daerah ini. Berikut tabel yang akan menyajikan PDRB menurut lapangan usaha.

Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Enrekang Tahun 2012 - 2016 (%)
Atas Dasar Harga Konstan 2010

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,74	3,37	7,83	7,28	8,03
2.	Pertambangan dan Penggalian	21,52	11,53	8,15	7,02	10,61
3.	Industri Pengolahan	13,32	8,84	5,68	0,88	7,42
4.	Pengadaan Listrik, Gas	14,94	13,40	12,67	-1,83	9,66
5.	Pengadaan Air	6,89	7,81	0,22	-1,42	7,89
6.	Konstruksi	8,46	8,08	4,11	8,43	7,12
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	16,39	6,72	5,41	7,08	10,74
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,04	5,76	4,21	9,09	9,82
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,25	3,62	10,27	5,41	7,20
10.	Jasa keuangan	14,54	9,3	7,13	7,46	13,41
11.	Jasa Perusahaan	14,49	6,35	5,19	5,93	3,40
12.	Jasa lainnya	7,80	6,71	8,41	8,12	0,29

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

Perekonomian Enrekang pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Enrekang tahun 2016 mencapai 7,64 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 6,90 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 ditempati oleh lapangan usaha Jasa Keuangan yang tumbuh sekitar 13,41 persen, dan terdapat lapangan usaha ekonomi PDRB pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang negatif, yakni lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial yang tumbuhnya sekitar (0,68).

Adapun lapangan usaha lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Ecer tercatat sebesar 10,74 persen; lapangan usaha Informasi & Komunikasi serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,61 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan pergudangan yang tumbuh skitar 9,82 persen ; Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan gas tumbuh sekitar 9,66; kemudian Lapangan Usaha Petanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sekitar 8,03 persen ; disusul Lapangan Usaha Pengadaan air yang tumbuh sekitar 7,89 persen pada tahun 2016.

E. Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Enrekang

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu mengenai penentuan sektor basis dan non basis di Kabupaten Enrekang maka kita gunakan analisis Location Quotient (LQ). Teknik analisis ini membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah (kabupaten) terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat provinsi.

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor dan non basis. Jika indeks $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, $LQ = 1$ maka sektor tersebut hanya mampu memenuhi permintaan di wilayahnya, sedangkan $LQ < 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor non basis.

Setelah mengolah data PDRB per sektor maka dihasilkan nilai indeks Location Quotient seperti yang terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3

**Indeks Location Quotient Kabupaten Enrekang Per Sektor Ekonomi
Tahun 2012-2016**

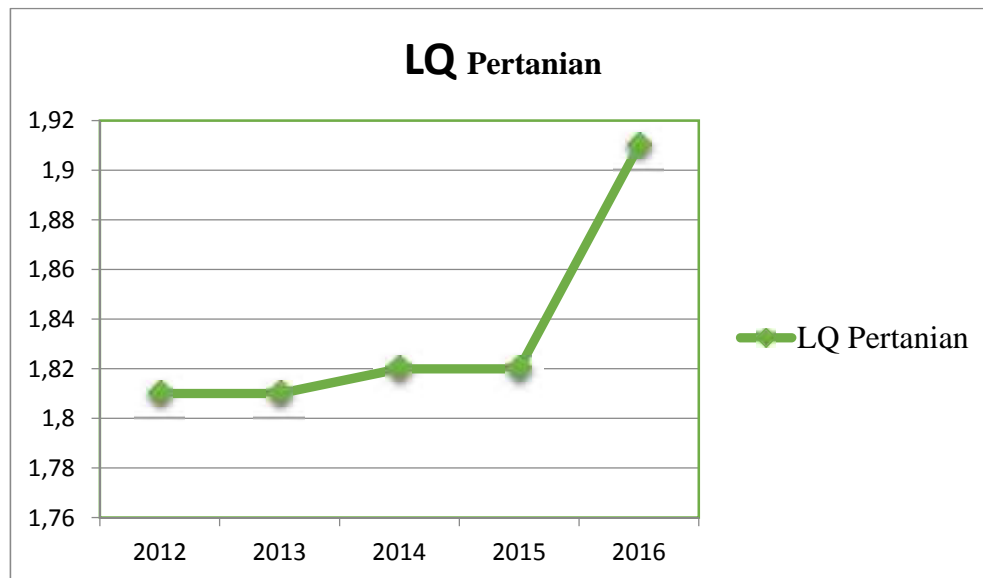
No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata	Klasifikasi sektor
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Pertanian	1.81	1.81	1.82	1.82	1.91	1.83	Basis
2	Pertambangan	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0.66	0.66	0.63	0.63	0.63	0.64	Non Basis
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.81	0.75	0.72	0.72	0.73	0.75	Non Basis
5	Bangunan	1.00	1.19	1.21	1.24	1.35	1.20	Basis
6	Perdagangan, hotel dan restoran	0.59	0.55	0.54	0.51	0.51	0.54	Non Basis
7	Angkutan dan Komunikasi	0.64	0.70	0.68	0.65	0.61	0.65	Non Basis
8	Keuangan dan Persewaan	0.75	0.78	0.79	0.80	0.78	0.78	Non Basis
9	Jasa-jasa	1.03	1.04	1.05	1.06	1.04	1.04	Basis

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

1. LQ Sektor Pertanian

Merujuk pada grafik 4.1, hasil dari analisis LQ selama lima tahun (2012-2016) mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Grafik 4.1
Perkembangan LQ di Sektor Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Enrekang

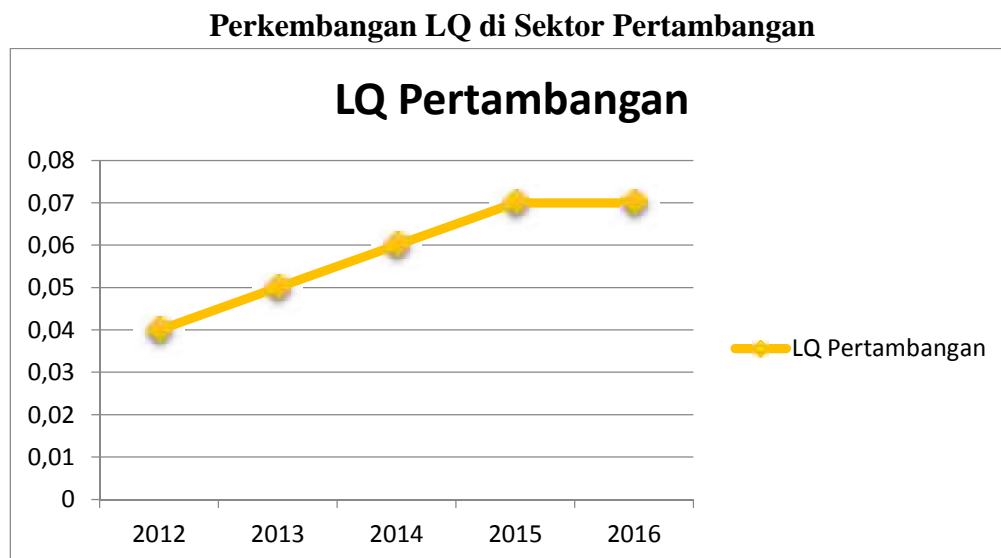
Indeks LQ sektor pertanian memiliki LQ rata-rata 1,83 ($LQ > 1$). Hal ini berarti sektor pertanian merupakan sektor basis atau sektor yang mampu memenuhi permintaan di sektor pertanian dan mampu mengekspor ke luar daerah. Hal tersebut disebabkan oleh letak yang strategis dan jenis tanah yang cocok untuk kegiatan perkebunan, persawahan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa luas panen tanaman pangan dan hortikultura tetap didominasi oleh komoditas padi, yaitu pada tahun 2010 dengan produksi sebesar 697.299 ton. Sedangkan komoditas lainnya berupa jagung dengan produksi sebesar 149.657 ton, kedelai dengan produksi mencapai 8.026, ubi kayu produksinya 7.704 ton, ubi jalar dengan produksi 2.716 ton, kacang tanah dengan produksi 24.022 ton.

Kemudian komoditas jenis tanaman perkebunan di Kabupaten Bone tahun 2010 antara lain kelapa dengan produksi 11.675 ton, coklat (kakao) dengan produksi 12.870 ton, cengkeh dengan produksi 2.087 ton, jambu mente dengan produksi 2.863 ton, kopi dengan produksi 247 ton, tembakau dengan produksi 863 ton

B. LQ Sektor Pertambangan

Grafik 4.2



Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

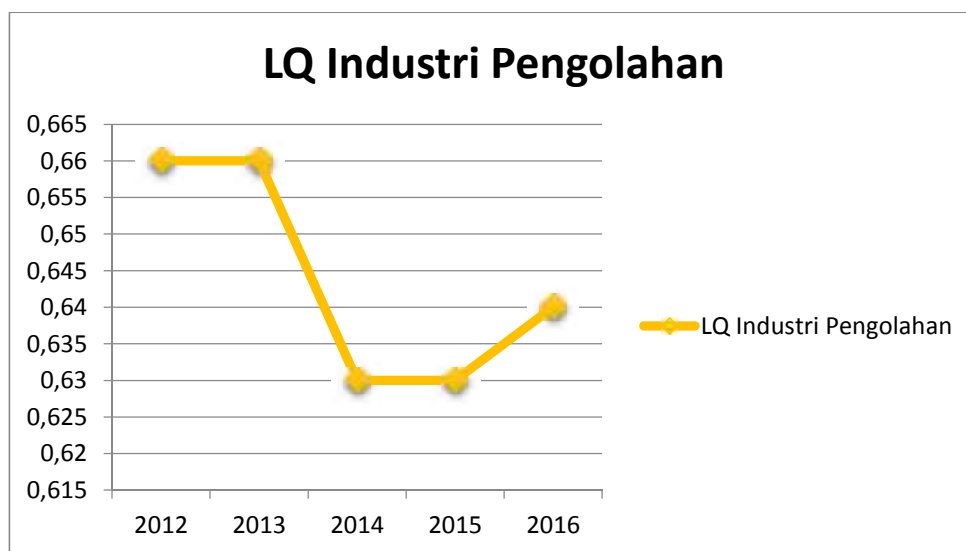
Pada tahun 2012 hingga 2013 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, namun terjadi penurunan di tahun 2012. Rata-rata nilai indeks LQ di sektor pertambangan yaitu sebesar 0.06 selama periode analisis ($LQ < 1$). Hal ini berarti bahwa sektor pertambangan merupakan sektor non basis atau sektor yang tidak mampu memenuhi permintaan dalam daerah. Untuk memenuhi kebutuhan di sektor ini maka dibutuhkan 94 persen (impor dari luar daerah) untuk memenuhi permintaan dalam daerah.

C. LQ Sektor Industri Pengolah

Dari hasil analisis LQ selama periode 2012-2013 yang tergambar pada grafik 4.3, sektor industri pengolahan menunjukkan penurunan.

Grafik 4.3

Perkembangan LQ di Sektor Industri Pengolahan



Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

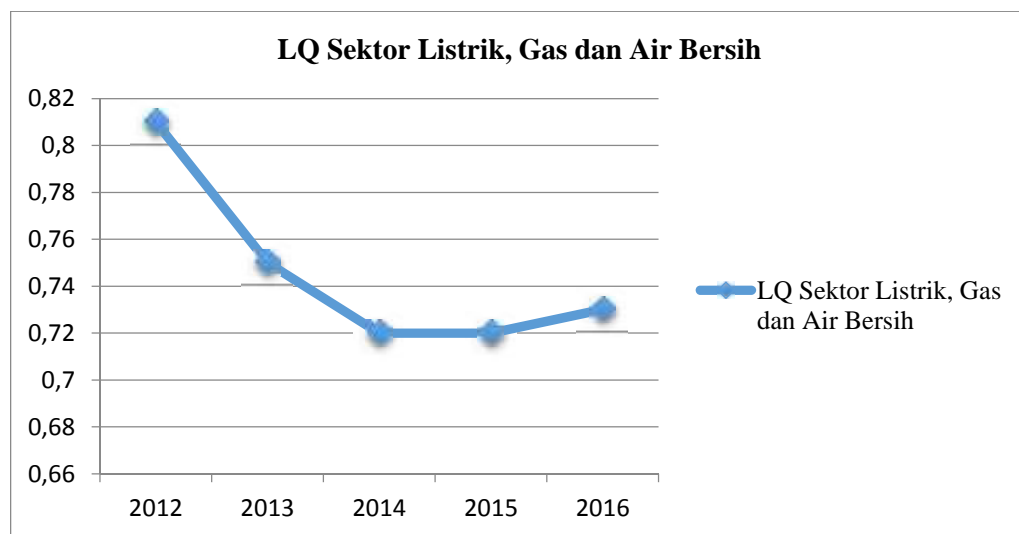
Di tahun 2012 sebesar 0,66 konsisten di tahun 2013, kemudian perlahan menurun hingga 0,63 persen di tahun 2016 terhadap total output. Rata-rata indeks LQ sektor industri pengolahan yaitu sebesar 0,64 ($LQ < 1$) selama periode analisis. Jadi, sektor industri dan pengolahan merupakan sektor non basis atau sektor yang tidak dapat memenuhi permintaan dalam daerah sendiri. Untuk memenuhi permintaan di dalam daerah maka harus mengimpor sebesar 36 persen dari total kebutuhan di sektor industri.

D. LQ Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Berdasarkan hasil analisis LQ pada grafik 4.4, indeks LQ sektor listrik gas air bersih mengalami penurunan selama empat tahun (2012-2015) kemudian naik di tahun 2016.

Grafik 4.4

Perkembangan LQ di Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih



Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

Indeks LQ dari 0,81 di tahun 2012 kemudian turun hingga 0,72 di tahun 2014, lalu naik menjadi sebesar 0,73 di tahun 2016. Nilai rata-rata LQ selama 5 tahun di sektor ini yaitu sebesar 0,75 ($LQ < 1$) selama periode analisis. Hal ini berarti sektor merupakan sektor non basis atau sektor yang tidak dapat memenuhi permintaan di daerahnya, sehingga harus mengimpor sebesar 25 persen dari total kebutuhan di dalam daerah.

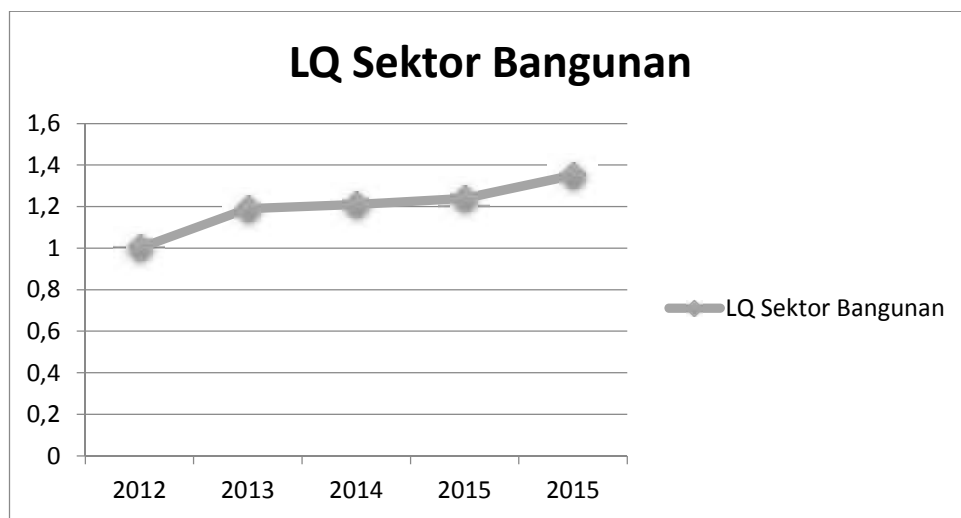
E.LQ Sektor Bangunan

Berdasarkan hasil analisis LQ pada grafik 4.5, indeks LQ sektor bangunan bergerak positif meninggalkan angka satu dalam periode analisis

yaitu dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,20 ($LQ > 1$). Hal tersebut berarti bahwa sektor bangunan merupakan sektor basis atau sektor yang dapat memenuhi permintaan dalam daerah dan memiliki surplus untuk diekspor ke luar daerah yaitu sebesar 20 persen dari total kebutuhan dalam daerah.

Grafik 4.5

Perkembangan LQ di Sektor Bangunan



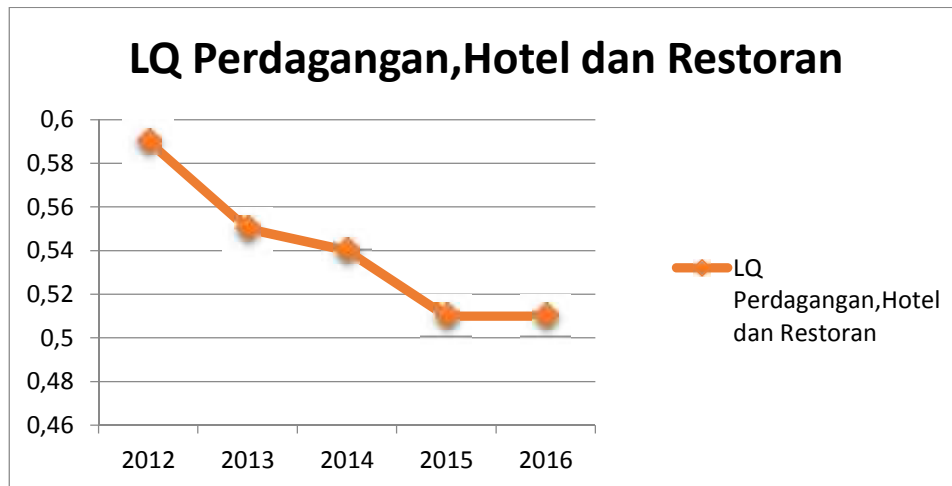
Sumber: Bps Kab.Enrekang

Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pembangunan infrastruktur berupa jalan raya, perluasan pelabuhan, pembangunan perumahan, dan juga investasi di sektor bangunan oleh pihak swasta di Kabupaten Enrekang selama lima tahun terakhir.

F.LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Grafik 4.6

Perkembangan LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran



Sumber: Bps Kab.Enrekang

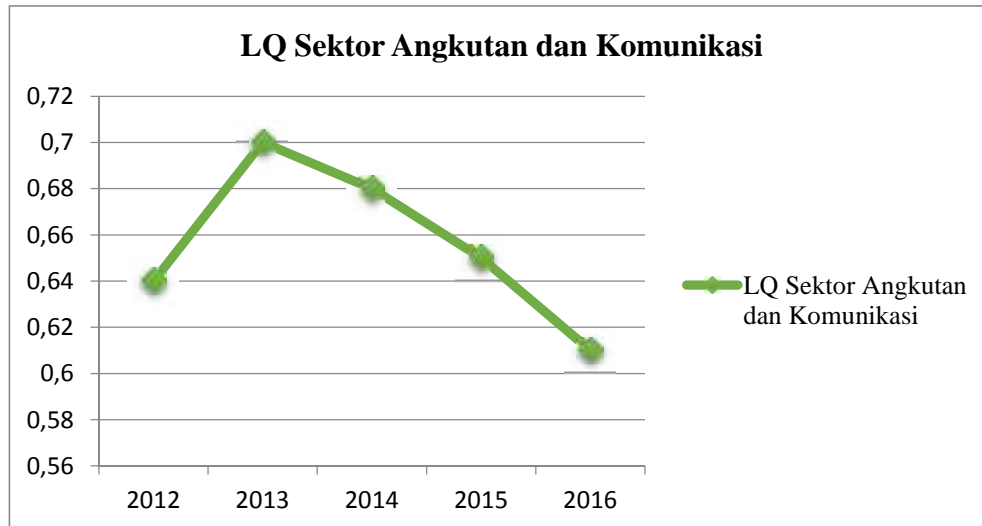
Berdasarkan hasil analisis LQ pada grafik 4.6, nilai LQ sektor perdagangan selama periode analisis menunjukkan penurunan dengan nilai LQ rata-rata 0,54 ($LQ < 1$). Hal itu berarti bahwa sektor perdagangan merupakan sektor basis atau sektor yang tidak mampu memenuhi permintaan dalam daerah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah maka harus mengimpor sebesar 46 persen dari total kebutuhan dalam daerah.

G.LQ Sektor Angkutan dan Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis LQ pada grafik 4.7, nilai rata-rata LQ sektor angkutan dan komunikasi Kabupaten Enrekang selama periode 2012-2016 sebesar 0,65 ($LQ < 1$). Artinya sektor ini merupakan sektor basis atau sektor yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah sehingga untuk memenuhi kebutuhan.

Grafik 4.7

Perkembangan LQ Sektor Angkutan dan Komunikasi

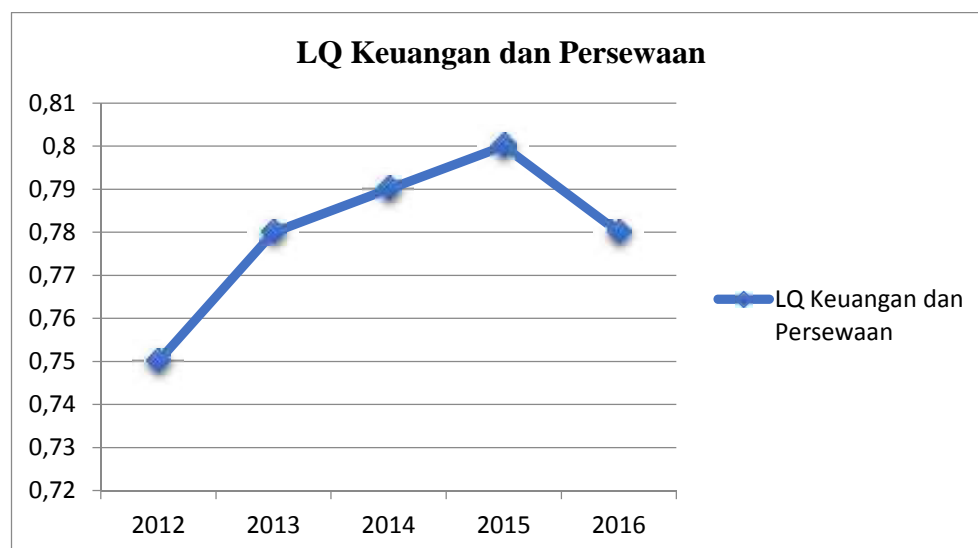


Sumber: BPS Kab.Enrekang

H.LQ Sektor Keuangan dan Persewaan

Grafik 4.8

Perkembangan LQ di Sektor Keuangan dan Persewaan



Sumber: BPS Kab.Enrekang

Berdasarkan hasil analisis LQ pada grafik 4.8, menunjukkan bahwa selama selama empat tahun (2012-2014) perkembangan LQ sektor keuangan

dan persewaan mengalami peningkatan dan kemudian turun di tahun 2016 sebesar 0,78. Nilai LQ rata-rata sektor keuangan dan komunikasi selama periode 2012-2016 yaitu sebesar 0,78 ($LQ < 1$).

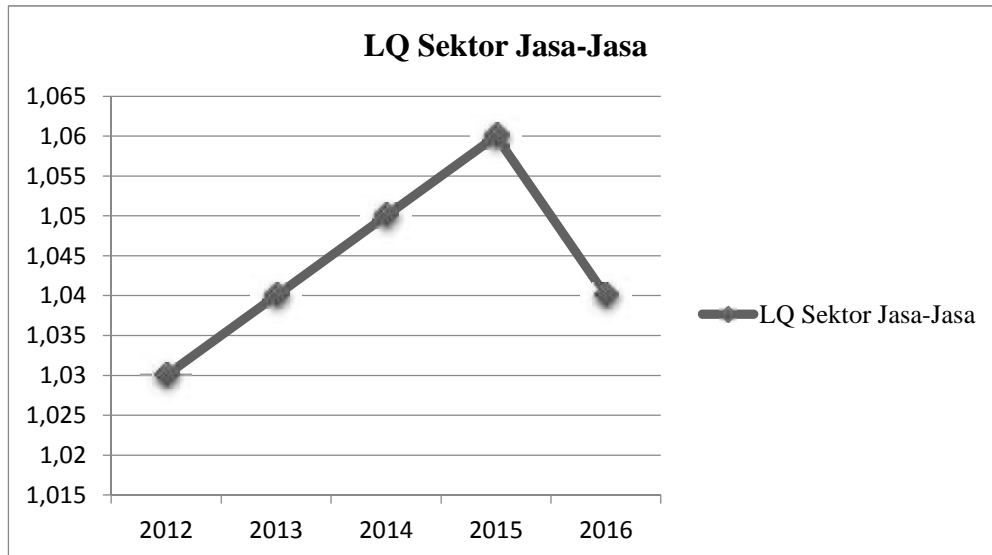
Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan dan persewaan merupakan sektor non basis atau sektor ini belum dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah, namun jika dilihat nilainya yang hampir mendekati angka satu, berarti sektor ini sektor yang hampir mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah. Dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah dibutuhkan 22 persen dari total kebutuhan dalam daerah.

LQ Sektor Jasa-Jasa

Hasil perhitungan nilai LQ Kabupaten Enrekang selama 2012-2016 yang tergambar pada grafik 4.9, menunjukkan angka yang cukup konsisten dengan nilai rata-rata di atas angka satu yaitu sebesar 1.04. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa-jasa termasuk sektor basis. Artinya sektor ini dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah sendiri tapi belum cukup mampu untuk mengekspor ke luar daerah karena surplus hanya sekitar 4 % dari total output. Komoditas yang diunggulkan Kabupaten Enrekang di sektor jasa-jasa yaitu wisata alam dan wisata budaya.

Grafik 4.9

Perkembangan LQ di Sektor Jasa-Jasa



Sumber: BPS Kab.Enrekang

Terlihat bahwa terdapat tiga sektor ekonomi yang merupakan sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Hal berarti bahwa sektor-sektor mampu menghasilkan komoditi sesuai permintaan yang di dalam daerahnya dan juga dapat mengekspor komoditi yang ada di sektor tersebut ke luar daerah. Sektor pertanian merupakan sektor dengan indeks LQ tertinggi dan menunjukkan angka yang meningkat di tiap tahunnya dengan nilai rata-rata mencapai 1,83. Kemudian sektor basis lainnya yaitu sektor bangunan (konstruksi) dengan nilai indeks LQ rata-rata sebesar 1,20. Kemudian sektor jasa-jasa juga memiliki indeks rata-rata $LQ > 1$ yaitu sebesar 1,04. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor bangunan, sektor jasa-jasa merupakan sektor yang unggul/dominan di daerah Kabupaten Enrekang. Selain itu sektor ini mampu memenuhi permintaan dalam wilayah dan mempunyai kelebihan untuk dijadikan komoditi ekspor.

Sektor yang merupakan sektor non basis yaitu sektor keuangan dan persewaan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan sektor perdagangan hotel restoran, sektor listrik gas dan air bersih, dan sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor dengan indeks LQ terendah yaitu sebesar 0,06. Sektor Perdagangan hotel restoran menunjukkan indeks LQ sebesar 0,54. Sektor listrik gas dan air bersih menunjukkan indeks LQ sebesar 0,72. Sektor industri pengolahan sebesar 0,64. Sektor angkutan dan komunikasi sebesar 0,65. Sektor keuangan dan persewaan sebesar 0,78. Hal tersebut berarti bahwa sektor-sektor tersebut tidak dapat memenuhi permintaan komoditi di dalam wilayah kabupaten Enrekang. Sektor-sektor tersebut harus mengimpor komoditi dari luar daerah untuk memenuhi permintaan komoditi dalam wilayah Kabupaten Enrekang

Meskipun sektor pertanian, sektor bangunan, sektor jasa-jasa (sektor basis) merupakan sektor unggulan yang sangat baik untuk dikembangkan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang, akan tetapi peran sektor non basis tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena dengan adanya sektor basis akan dapat membantu pengembangan sektor non basis menjadi sektor basis baru.

F. Perubahan dan Pergeseran Struktur Perekonomian Kabupaten Enrekang

Untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan mengenai perubahan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Enrekang. Pertumbuhan PDRB total dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share*, yaitu :

- a. Komponen *Provincial Share* (P) adalah banyaknya pertambahan PDRB Kabupaten Enrekang seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Komponen *Proportional Share* (PS), mengukur besarnya *net shift* Kabupaten Enrekang yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB Kabupaten Enrekang yang berubah. Apabila $P > 0$, artinya Kabupaten Enrekang berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh relatif cepat, $P < 0$ artinya Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh lebih lambat atau sedang menurun.
- c. Komponen *Differential Shift* (DS), mengukur besarnya *net shift* yang diakibatkan oleh sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di Kabupaten Enrekang dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh faktor-faktor lokal atau memiliki daya saing. Suatu sektor dikatakan memiliki daya saing apabila mempunyai nilai DS yang positif ($DS > 0$), sebaliknya apabila suatu sektor tidak memiliki daya saing maka mempunyai nilai DS yang negatif ($DS < 0$).

A. Analisis Shift Share

Berdasarkan hasil analisis Shift-Share pada tabel 4.4, dalam periode 2012-2016 terjadi perubahan PDRB Kabupaten Enrekang yang mencapai Rp. 770,37 milyar atau meningkat sebesar 31,54 persen. Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan sebesar Rp. 775,04 milyar atau sebesar 100,61 persen (Provincial Share). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Enrekang masih sangat tergantung oleh perekonomian Sulawesi Selatan.

Tabel 4.4

Perubahan Sektor dan Komponen yang Mempengaruhi Perekonomian Kabupaten Enrekang 2012-2016 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	Regional Change	Provincial Share	Proportional Shift	Differential Shift
1.	Pertanian	316,275.16	425,503.87	193,467.38	84,238.67
2.	Pertambangan	9,590.54	3,040.27	-1,641.66	8,191.93
3.	Industri Pengolahan	42,744.27	72,300.95	-14,603.63	-14,953.05
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	5,415.66	5,969.76	2,283.45	-2,837.55
5.	Bangunan	132,483.74	35,644.99	34,253.44	62,585.31
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	63,749.57	68,094.56	40,791.75	-45,136.74
7.	Angkutan dan Komunikasi	57,886.54	37,345.28	29,555.83	-9,014.56
8.	Keuangan dan Persewaan	72,294.14	35,132.71	31,178.20	5,983.23
9.	Jasa-jasa	69,934.21	92,008.83	-23,612.57	1,537.95
	TOTAL CHANGE	770,373.83	775,041.23	-95,262.57	90,595.18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang dan Sulawesi Selatan 2012-2016 (diolah)

Di tingkat sektoral, pertumbuhan output yang terjadi pada sektor pertanian selama periode analisis mencapai Rp.316,27 milyar. Pengaruh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi sebesar Rp. 425,50 milyar atau

sebesar 134,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan nasional dan provinsi di sektor pertanian sangat besar. Sementara kondisi struktur ekonomi di tingkat provinsi, berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan output sektor ekonomi di sektor pertanian Kabupaten Enrekang. Pengaruh bauran industri (PS) ini sebesar -61.17 persen dari total perubahan atau efek ini mengurangi pertumbuhan output di sektor pertanian sebesar Rp. 193,46 milyar. Sedangkan pengaruh dari faktor lokal atau daya saing daerah (DS) terhadap pertumbuhan output di sektor pertanian sebesar 26,63 persen dari total perubahan. Artinya, pertumbuhan output sebesar Rp. 84,23 milyar disebabkan oleh faktor daya saing daerah. Atau dapat dikatakan juga bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang tumbuh lambat namun sektor pertanian memiliki daya saing yang kuat terhadap daerah lain.

Pada sektor pertambangan, terjadi pertumbuhan output sebesar Rp. 9,59 milyar selama periode analisis. Sebanyak 31,70 persen dari nilai itu disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan atau sebesar Rp. 3,04 milyar. Sedangkan faktor dari efek bauran industri mengurangi pertumbuhan output di sektor pertambangan sebesar Rp. 1,64 milyar atau sebesar -17,12 persen dari total perubahan. Sementara faktor daya saing daerah menyebabkan pertumbuhan output naik sebesar Rp. 8,19 milyar atau sebesar 85,42 persen dari total perubahan. Atau dapat dikatakan juga bahwa sektor pertambangan ini memiliki pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan namun sektor ini cukup memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor yang sama.

Pada sektor industri pengolahan terjadi pertumbuhan output sebesar Rp. 42,74 milyar selama periode analisis. Faktor pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan berpengaruh sebesar 169,15 persen dari total perubahan atau sebesar Rp. 72,30 milyar. Sedangkan faktor bauran industri berpengaruh sebesar -34,17 persen dari total perubahan atau mengurangi pertumbuhan output sebesar Rp. 14,60 milyar. Sementara faktor daya saing daerah juga berpengaruh negatif terhadap perubahan output yaitu sebesar 34,98 persen atau mengurangi pertumbuhan output sebesar Rp. 14,95 milyar. Atau dapat dikatakan juga bahwa sektor industri dan pengolahan ini memiliki pertumbuhan yang lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi dan juga sektor industri ini tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lain di sektor yang sama.

Pada sektor listrik, gas dan air bersih, terjadi pertumbuhan output sebesar Rp. 5,41 milyar selama periode analisis. Dari total itu, sebesar Rp. 5,96 milyar pertumbuhan output disebabkan oleh komponen share dari pertumbuhan Sulawesi Selatan atau sebesar 110,23 persen dari total perubahan. Sementara faktor bauran industri menyebabkan pertumbuhan sebesar Rp. 2,28 milyar atau sebesar 42,16 persen dari total perubahan. Sedangkan faktor daya saing daerah menyebabkan penurunan pertumbuhan output sebesar Rp. 2,83 milyar atau sebesar -52,40 persen dari total perubahan. Atau dengan kata lain sektor listrik gas dan air bersih memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi namun sektor ini kurang mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan daerah lain.

Di sektor bangunan, terjadi pertumbuhan output sebesar Rp. 132,48 milyar selama periode analisis. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan tersebut yaitu sebesar Rp.35,64 milyar atau sekitar 26,91 persen. Hal itu diikuti juga oleh faktor bauran industri yang menyebabkan pertumbuhan output sebesar Rp. 34,25 milyar atau sebesar 25,84 persen dari total perubahan. Sedangkan faktor daya saing daerah menyebabkan pertumbuhan output di sektor ini sebesar Rp. 62,58 milyar atau sebesar 47,24 persen dari total perubahan. Atau dengan kata lain, sektor bangunan di Kabupaten Enrekang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi dan sektor ini memiliki memiliki daya saing yang sangat tinggi.

Pada sektor perdagangan, terjadi pertumbuhan output sebesar Rp. 63,74 milyar selama periode analisis. Faktor komponen share memberikan kontribusi terhadap perubahan tersebut sebesar Rp. 68,09 milyar atau sekitar 106,82 persen dari total perubahan. Sedangkan faktor bauran industri menyebabkan pertumbuhan output sebesar Rp. 40,79 milyar atau sebesar 63,99 persen dari total perubahan. Sementara faktor daya saing daerah menyebabkan penurunan pertumbuhan output sebesar Rp. 45,13 milyar atau sebesar -70,80 persen dari total perubahan. Atau dapat dikatakan bahwa sektor ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi namun sektor ini tidak memiliki daya saing terhadap daerah lain dengan sektor yang sama.

Pada sektor angkutan dan komunikasi terjadi pertumbuhan output sebesar Rp. 57,88 milyar selama periode analisis. Komponen share nya sebesar Rp. 37,45 milyar atau 64,51 persen. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan output provinsi

berpengaruh terhadap sektor ini. Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya kegiatan transportasi antar kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan faktor bauran industri juga berdampak positif terhadap pertumbuhan output di sektor angkutan, yaitu sebesar Rp.29,55 milyar atau 51,06 persen dari total perubahan. Adapun faktor daya saing daerah menyebabkan penurunan output sebesar Rp. 9,01 milyar atau -15 persen dari total perubahan. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi namun sektor ini tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lain untuk sektor yang sama.

Pada sektor keuangan terjadi pertumbuhan output sebesar Rp.72,29 milyar selama periode analisis. Perekonomian nasional memberi dampak positif terhadap pertumbuhan di sektor keuangan sebesar Rp.35,13 milyar atau sebesar 48,60 persen dari total perubahan. Sedangkan efek bauran industri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output yaitu sebesar Rp.31,17 milyar atau 43,13 persen dari total perubahan. Sementara faktor daya saing juga menyebabkan pertumbuhan output yaitu sebesar Rp.5,9 milyar atau sebesar 8,28 persen terhadap total perubahan. Atau dapat dikatakan bahwa sektor keuangan dan persewaan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi dan sektor ini memiliki daya saing yang cukup kuat terhadap daerah lain pada sektor yang sama.

Kemudian sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan output sebesar Rp.69,93 milyar selama periode analisis. Faktor pertumbuhan Sulawesi selatan menyebabkan kenaikan sebesar Rp. 92,01 milyar atau sebesar 131,56 persen

terhadap total perubahan. Faktor bauran industri menyebabkan penurunan pertumbuhan output sebesar Rp. 23, 612 milyar atau sebesar -33,76 persen terhadap total perubahan. Sedangkan faktor daya saing daerah kenaikan output sebesar Rp. 1,53 milyar atau sebesar 2,20 persen terhadap total perubahan. Atau dengan kata lain, sektor jasa-jasa tumbuh lebih lambat di bandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi namun sektor ini memiliki daya saing yang cukup kuat terhadap daerah lain di sector yang sama.

Dari hasil perhitungan analisis *shift share*, sektor yang termasuk berkembang di Kabupaten Enrekang yang sesuai dengan Sulawesi Selatan (*industrial mix*), yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan. Adapun sektor yang tidak sesuai yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dan sektor jasa-jasa.

Sektor yang memiliki daya saing tinggi di Kabupaten Enrekang yaitu sektor pertanian, pertambangan, bangunan, keuangan dan jasa-jasa. Sedangkan yang tidak memiliki daya saing yaitu sektor industri, perdagangan, dan sektor listrik gas dan air bersih.

B. Analisis *Shift Share* Pergeseran Bersih

Pergeseran bersih merupakan bagian dari analisis shift share yang dapat dihitung dari hasil penjumlahan *Proportional Shift* (PS) dan *Differential Shift* (DS) di setiap sektor perekonomian. Apabila $PB > 0$, maka pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Enrekang termasuk dalam kelompok progresif (maju). Sedangkan jika nilai pergeseran bersih suatu sektor $PB < 0$, maka pertumbuhan di

sektor tersebut termasuk dalam kelompok yang lamban. Berdasarkan hasil dari perhitungan pergeseran bersih (net shift), maka secara agregat pergeseran bersih menghasilkan nilai negatif, yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB pada periode analisis sebesar negatif Rp. 4,66 milyar. Hal tersebut berarti bahwa secara umum pertumbuhan di Kabupaten Enrekang lamban. Secara sektoral, sektor yang memiliki nilai $PB > 0$ yaitu sektor pertambangan, bangunan, angkutan dan komunikasi, keuangan dan persewaan. Hal ini berarti sektor-sektor merupakan sektor yang progresif atau maju. Sedangkan sektor yang memiliki nilai $PB < 0$ ialah sektor pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, dan sektor jasa-jasa. Hal ini berarti sektor-sektor tersebut termasuk sektor yang lamban. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.5

Analisis Shift Share Pergeseran Bersih (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	Proportional Shift	Differensial Shift	Net Shift
1.	Pertanian	-193,467.38	84,238.67	-109,228.71
2.	Pertambangan	-1,641.66	8,191.93	6,550.27
3.	Industri Pengolahan	-14,603.63	-14,953.05	-29,556.68
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,283.45	-2,837.55	-554.10
5.	Bangunan	34,253.44	62,585.31	96,838.75
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	40,791.75	-45,136.74	-4,344.99
7.	Angkutan dan Komunikasi	29,555.83	-9,014.56	20,541.26
8.	Keuangan dan Persewaan	31,178.20	5,983.23	37,161.43
9.	Jasa-jasa	-23,612.57	1,537.95	-22,074.62
	TOTAL	-95,262.57	90,595.18	-4,667.40

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang dan Sulawesi Selatan 2012-2016 (diolah)

Pada sektor pertanian, pergeseran bersih mengurangi pertumbuhan output sebesar Rp. 109,22 milyar terhadap total perubahan. Pada sektor pertambangan

pergeseran bersih meningkatkan output sebesar Rp. 6,55 milyar terhadap total perubahan. Pergeseran bersih di sektor industri membebani pertumbuhan output sebesar Rp. 29,55 milyar. Pada sektor listrik gas dan air bersih pergeseran bersihnya mengurangi pertumbuhan output sebesar Rp. 0,55 milyar. Pada sektor bangunan pergeseran bersih mendorong pertumbuhan output sebesar Rp. 96,83 milyar. Pada sektor perdagangan, pergeseran bersih mengurangi pertumbuhan output sebesar Rp. 4,34 milyar, angkutan mendorong pertumbuhan output sebesar Rp. 20,54 milyar. Keuangan mendorong pertumbuhan output sebesar Rp. 37,16 milyar. Jasa-jasa membebani pertumbuhan output sebesar Rp. 22,07 milyar.

Secara keseluruhan hasil perhitungan pergeseran bersih memperlihatkan bahwa Kabupaten Enrekang secara umum pertumbuhan ekonominya cukup lambat. Hasil ini terlihat dari hasil penjumlahan antara faktor bauran industri dan faktor daya saing terhadap perubahan PDRB pada periode analisis dengan hasil perhitungan pergeseran bersih sebesar negatif Rp. 4,66 milyar.

G. Ringkasan Hasil Analisis dan Relevansi Kebijakan yang Tepat di Kabupaten Enrekang

Dari berbagai analisis dapat diringkas untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing sektor dilihat dari tingkat basis, kecepatan perkembangan di tingkat provinsi, daya saing dan tingkat progresifnya. Dari hasil analisis, penulis mencoba untuk mengelompokkan menjadi lima bagian yaitu sektor yang memiliki empat keunggulan, sektor yang memiliki tiga keunggulan, sektor yang memiliki dua keunggulan, sektor yang memiliki satu keunggulan, dan sektor yang sama sekali tidak memiliki keunggulan.

Sektor yang memiliki empat keunggulan sekaligus hanya ada satu sektor yaitu sektor bangunan. Sektor bangunan merupakan sektor basis, memiliki keunggulan komparatif atau kemampuan spesialisasi, memiliki pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan tingkat provinsi, memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing, dan laju pertumbuhannya termasuk progresif (maju). Artinya sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan

Sektor yang memiliki tiga keunggulan yaitu sektor keuangan dan persewaan. Sektor keuangan dan persewaan memiliki kelebihan yaitu memiliki pertumbuhan cepat dibandingkan dengan tingkat provinsi, memiliki keunggulan kompetitif atau berdaya saing, dan laju pertumbuhan tergolong progresif (maju). Namun sektor ini tidak memiliki kemampuan untuk berspesialisasi (non basis). Artinya sektor ini potensial untuk dikembangkan.

Sektor yang memiliki dua keunggulan yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Sektor pertanian dan sektor jasa-jasa memiliki keunggulan komparatif/spesialisasi (sektor basis) dan memiliki keunggulan kompetitif (daya saing). Kemudian sektor pertambangan memiliki keunggulan kompetitif dan laju pertumbuhan tergolong progresif. Artinya sektor-sektor tersebut cukup potensial untuk dikembangkan.

Berbeda dengan sektor angkutan dan komunikasi yang memiliki keunggulan dari segi laju pertumbuhan dibandingkan dengan tingkat provinsi dan laju pertumbuhan yang tergolong progresif. Artinya sektor angkutan dan komunikasi memiliki pertumbuhan yang cepat namun tidak memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Sektor yang memiliki satu keunggulan yaitu sektor perdagangan dan sektor listrik gas air bersih. Kedua sektor tersebut sama-sama memiliki keunggulan pada kategori pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan tingkat provinsi. Namun tidak memiliki keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif dan pertumbuhan tergolong lamban.

Sektor yang sama sekali tidak memiliki keunggulan yaitu sektor industri pengolahan. Artinya sektor ini sama sekali tidak memiliki keunggulan oleh karena itu sektor ini tidak potensial untuk dikembangkan.

Selama ini pemerintah Kabupaten Enrekang hanya memprioritaskan sektor pertanian, industri dan perdagangan. Padahal menurut hasil analisis yang dilakukan selama periode 2012-2016 sektor pertanian memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif namun pertumbuhannya tergolong lambat. Sektor industri tidak memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dan pertumbuhan di sektor industri juga tergolong lamban (kurang potensial). Sedangkan sektor perdagangan hanya memiliki pertumbuhan yang cepat di tingkat provinsi dan tidak memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta pertumbuhannya juga tergolong lamban (kurang potensial). Jika ingin menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang berkembang maju, mandiri dan berdaya saing, maka penulis menyimpulkan rekomendasi kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang dengan memprioritaskan sektor-sektor yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan yaitu sektor bangunan, sektor jasa-jasa, sektor keuangan dan sektor pertanian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sektor basis di Kabupaten Enrekang yaitu sektor pertanian, bangunan, dan jasa-jasa. Sedangkan sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, perdagangan hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan dan persewaan.
2. Sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat di tingkat provinsi (PS+) yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran, bangunan, keuangan dan persewaan, angkutan dan komunikasi, dan listrik gas dan air bersih. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing (DS+) yaitu sektor pertanian, bangunan, pertambangan dan penggalan, keuangan dan persewaan, dan jasa-jasa.

Sektor yang memiliki pertumbuhan yang progresif (PB+) yaitu sektor bangunan, keuangan dan persewaan, angkutan dan komunikasi, dan pertambangan.

Sektor yang memiliki beberapa keunggulan seperti sektor bangunan yang memiliki pertumbuhan yang cepat di tingkat provinsi, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, dan termasuk dalam pertumbuhan yang progresif (maju). Sektor keuangan dan persewaan memiliki keunggulan kompetitif, pertumbuhannya cepat di tingkat provinsi, dan termasuk dalam kategori

pertumbuhan yang progresif. Kemudian sektor pertanian dan sektor jasa-jasa memiliki keunggulan komparatif dan memiliki daya saing. Dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki maka sektor-sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ambardi, U.M dan Socia, P. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, <http://www.Bappenas.go.id/node/123/3/uu-no32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2012.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* <http://www.Bappenas.go.id/node/123/3/uu-no33-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2012.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang, 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 Kabupaten Enrekang* <http://www.enrekang.go.id/download/PERDA%20RPJMD.pdf>, diakses tanggal 4 Maret 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Enrekang 2011*. Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2011. *Kabupaten Enrekang dalam Angka*. Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Enrekang 2011*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Basuki, Agus Tri, 2005. "Peranan Kabupaten Way Kanan dalam Pembentukan PDRB Provinsi Lampung Tahun 1999-2002", *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPF, Yogyakarta.

- Fachrurrazy, 2009. "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB". *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ghufron, Muhammad. 2008. "Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur". *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Gravitiani, Evi, 2006. "Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Yogyakarta". *Skripsi*, FE-UGM, Yogyakarta.
- Jhingan, ML, 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Kuncoro, M, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Purwaningsih, 2009. "Analisis Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten Parigi Moutong", *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Badouse Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Soepono, Prasetyo, 1993. *Analisis Shift-Share Perkembangan dan Penerapan*, JEBI, No.1, Tahun III.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. LPFE-UI, Jakarta.
- Suryana, 2000. *Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Tarmidi, Lepi T, 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Pusat Antar Universitas EK-UI, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2000. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip-prinsip Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta

LAMPIRAN

**Data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 - 2016 Berdasarkan
Harga Konstan 2000 (juta rupiah)**

No	Lapangan usaha	2012	2013	3014	2015	2016
1	Pertanian	11,802,563.14	12,181,818.23	12,923,422.93	13,528,694.51	13,844,685.62
2	Pertambangan dan Penggalian	3,891,338.22	4,157,151.84	4,034,942.76	3,852,793.21	4,459,322.37
3	Industri dan Pengolahan	5,481,512.85	5,741,389.91	6,241,442.02	6,468,785.46	6,869,433.85
4	Listrik Gas dan Air Bersih	368,274.35	400,881.01	450,999.19	490,447.48	529,818.01
5	Bangunan	1,787,872.72	1,942,088.56	2,328,425.32	2,656,772.23	2,900,265.53
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	5,770,903.64	6,322,425.76	7,034,556.56	7,792,098.43	8,698,811.13
7	Angkutan dan Komunikasi	2,945,640.97	3,244,612.89	3,651,369.31	4,023,676.45	4,619,928.73
8	Keuangan dan Persewaan	2,340,471.90	2,610,477.11	2,881,068.05	3,203,983.96	3,742,089.31
9	Jasa-jasa	4,479,101.42	4,731,580.99	5,003,598.42	5,308,826.66	5,535,545.30
	Jumlah	38,867,679.21	41,332,426.30	44,549,824.56	47,326,078.39	51,199,899.85

Sumber: BPS Sulawesi Selatan

**Data PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Harga
Konstan 2010 (juta)**

No	Lapangan usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian	1,341,068.12	1,380,332.62	1,462,049.62	1,550,930.62	1,657,343.28
2	Pertambangan dan Penggalian	9,582.07	12,422.65	15,092.60	17,871.91	19,172.61
3	Industri Pengolahan	227,872.20	237,915.34	246,286.32	256,289.04	270,616.47
4	Listrik dan Air Bersih	18,815.01	18,765.36	20,294.34	22,194.95	24,230.67
5	Bangunan	112,342.96	144,718.18	175,414.73	208,482.45	244,826.70
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	214,614.84	216,803.06	235,432.45	251,041.22	278,364.41
7	Angkutan dan Komunikasi	117,701.77	142,097.34	154,052.84	163,989.91	175,588.31
8	Keuangan dan Persewaan	110,728.38	126,920.72	141,595.06	161,404.30	183,022.52
9	Jasa-jasa	289,985.87	309,322.77	326,441.88	353,718.00	359,920.08
	Jumlah	2,442,711.22	2,589,298.04	2,776,659.84	2,985,922.40	3,213,085.05

Sumber : BPS kab.Enrekang

Indeks Location Quotient per Sektor Ekonomi Kabupaten Enrekang 2012-2016

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	LQ Rata-Rata
1	Pertanian	1.81	1.81	1.82	1.82	1.91	1.83
2	Pertambangan	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06
3	Industri Pengolahan	0.66	0.66	0.63	0.63	0.63	0.64
4	Listrik Gas dan Air Bersih	0.81	0.75	0.72	0.72	0.73	0.75
5	Bangunan	1.00	1.19	1.21	1.24	1.35	1.20
6	Restoran	0.59	0.55	0.54	0.51	0.51	0.54
7	Komunikasi	0.64	0.70	0.68	0.65	0.61	0.65
8	Keuangan Dan Persewaan	0.75	0.78	0.79	0.80	0.78	0.78
9	Jasa-Jasa	1.03	1.04	1.05	1.06	1.04	1.04

Sumber: BPS Sulawesi Selatan dan BPS kab.Enrekang(diolah)

Perubahan PDRB Kab.Enrekang 2012 – 2016

NO	Lapangan Usaha	2012	2016	Jumlah	Persen
1	Pertanian	1,341,068.12	1,657,343.28	316,275.16	23.58382511
2	Pertambangan dan Penggalian	9,582.07	19,172.61	9,590.54	100.0883943
3	Industri Pengolahan	227,872.20	270,616.47	42,744.27	18.7580012
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	18,815.01	24,230.67	5,415.66	28.78372108
5	Bangunan	112,342.96	244,826.70	132,483.74	117.9279414
6	Perdagangan, Hotel Restoran	214,614.84	278,364.41	63,749.57	29.7041761
7	Angkutan dan Komunikasi	117,701.77	175,588.31	57,886.54	49.18068777
8	Keuangan dan Persewaan	110,728.38	183,022.52	72,294.14	65.28962132
9	Jasa-jasa	289,985.87	359,920.08	69,934.21	24.11641988
	TOTAL PDRB	2,442,711.22	3,213,085.05	770,373.83	31.5376547